

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

Dr. Binoto Nadapdap, Hukum Perseroan Terbatas, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2018

Erman Radjagukguk, *Pengelolaan Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005.

H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 2. Djambatan, Jakarta, 2007

J. Satrio, *Hukum Pribadi Bagian I Persoon Alamiah*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999

M. Syamsudin, *Operasi Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007

M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015

Munir Fuandy *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*, CV Utomo, Bandung, 2005

Muntu Fajar MD dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010

Nindyo Pramono, *Hukum PT go public dan Pasar Modal Yogyakarta*, Andi Publisher, 2013

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan Keempat, Kencana, Jakarta, 2005

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, 2008

Philipus M. Handjon, *Tentang Wewenang*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1998

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008

Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2008

Rutzel MSJD cs, *Conteraporary Business Law*, Fourth Edition, Mc Graw Hill, Publishing Company, 1990

Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai Dengan Ulasan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1995*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Simon Fisher, Corporation Law, Butterworths, Australia, 2001
- Sentosa Sembiring, *hukum perusahaan tentang Perseroan Terbatas*, nuansa aulia, Bandung, 2012
- Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermesa, Jakarta, 1980
- Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta 2011
- Sutrisno dan wiwin yulianingsih, *Etika profesi hukum*, CV. Andi Offset, yogyakarta, 2016
- Syahrul, S.E., Muhammad Afni Nazar, S.H., Ardiyas, *Kamus Lengkap Ekonomi*, Citra Harta Prima, Jakarta, 2000
- Wawan Setiawan, *Panel Diskusi Universitas Airlangga - INI Jatim*, Surabaya, 1 Juni 1996.

WEBSITE:

- Izin berusaha kini lebih mudah diakses dari [https://kominfo.go.id/content/detail/13373/izin-berusaha-kini-lebih-mudah-pemerintah-meluncurkan-sistem-oss/0/artikel\\_gpr](https://kominfo.go.id/content/detail/13373/izin-berusaha-kini-lebih-mudah-pemerintah-meluncurkan-sistem-oss/0/artikel_gpr) Pada 01 Oktober 2019 Pukul 14.09 WIB
- Laman Websitr OSS diakses dari <https://www.oss.go.id/oss/#> Pada 22 Oktober 2018 Pukul 05.39 WIB
- Kumpulkan pengusaha bahas sistem perizinan online Diakses dari <https://detik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis/d-4037850/darmin-kumpulkan-pengusaha-bahas-sistem-perizinan-online> Pada 21 Oktober 2019 Pukul 21.13 WIB

## JURNAL:

H.M. Laica Marzuki, Jurnal Aspek Hukum Administrasi Negara dari Perseroan Terbatas, hlmn. 212 diakses pada [https://www.researchgate.net/publication/318650269\\_Aspek\\_Hukum\\_Administrasi\\_dari\\_PT](https://www.researchgate.net/publication/318650269_Aspek_Hukum_Administrasi_dari_PT) tanggal 1 Oktober 2019 Pada 18.50 WIB

Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintah Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Bandung: Universitas Parahayangan, 2000.

## UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13 jo Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3587

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka di Bidang Penanaman Modal

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-01: HT.01.10 Tahun 2007 tanggal 21 September 2007 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-01: HT.01.01 tahun 2008 tentang Daftar Perseroan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.H-09.AH.01.01 tahun 2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Tim Ahli Pemantauan Hukum Perseroan.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik